

## DIGITALISASI PELAYANAN SOSIAL MELALUI SI-SINTAL: STUDI IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA BANJARMASIN

Mohammad Rezza Fahlevvi, Daud Manurung, Adhiyaksa Arif

Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Mei 2025

Revised Mei 2025

Accepted Mei 2025

Available online Mei 2025

#### Email:

[rezza@ipdn.ac.id](mailto:rezza@ipdn.ac.id)

[daudmanurung2004@gmail.com](mailto:daudmanurung2004@gmail.com)

[adhiyaksaarif2@gmail.com](mailto:adhiyaksaarif2@gmail.com)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### Abstrak

SI-SINTAL (Sistem Informasi Manajemen Data Kesejahteraan Sosial) merupakan inisiatif digital Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mereformasi layanan kesejahteraan sosial berbasis elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SI-SINTAL dalam pengelolaan bantuan sosial, mengevaluasi efektivitasnya, serta mengidentifikasi kendala teknis dan struktural yang menghambat optimalisasi sistem. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik observasi partisipatif selama kegiatan magang di Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SI-SINTAL mempercepat proses pengajuan dan penyaluran bantuan sosial, meningkatkan transparansi melalui fitur pelacakan daring berbasis NIK, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui mekanisme sanggah bantuan. Sistem ini juga membantu memperkuat pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara objektif berbasis skor kesejahteraan. Namun demikian, keterbatasan kapasitas operator, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kendala infrastruktur seperti koneksi internet dan beban server masih menjadi hambatan utama. Penelitian merekomendasikan pelatihan teknis berkala, integrasi sistem dengan data kependudukan nasional, serta penguatan literasi digital publik. SI-SINTAL berpotensi besar menjadi model digitalisasi layanan sosial daerah jika didukung ekosistem teknis dan kelembagaan yang solid.

**Kata kunci:** SI-SINTAL, Pelayanan Sosial, Digitalisasi

### Abstract

*SI-SINTAL (Social Welfare Data Management Information System) is a digital initiative developed by the Banjarmasin City Government to reform social welfare services through electronic systems. This study aims to analyze the implementation of SI-SINTAL in managing social assistance programs, evaluate its effectiveness, and identify technical and structural challenges hindering system optimization. A descriptive qualitative approach was employed, utilizing participatory observation during the internship at the Banjarmasin Social Affairs Office. Findings reveal that SI-SINTAL significantly accelerates the submission and distribution of social aid, enhances transparency through NIK-based tracking features, and promotes public involvement via a social aid objection mechanism. The system also supports accurate updates to the Integrated Social Welfare Data (DTKS) using a welfare scoring method. Despite these advantages, issues such as limited operator competence, low digital literacy among beneficiaries, and infrastructure constraints including weak internet access and server overload remain key obstacles. This study recommends periodic technical training, system integration with the national population database, and improved public digital literacy. SI-SINTAL holds strong potential to serve as a replicable model for local-level social service digitalization, provided it is supported by a robust technical and institutional ecosystem.*

**Keywords:** SI-SINTAL, Social Services, Digitalization

## PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan agenda utama dalam reformasi birokrasi di Indonesia, termasuk dalam bidang kesejahteraan sosial. Seiring perkembangan teknologi informasi, digitalisasi pelayanan publik menjadi langkah strategis untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Salah satu bentuk konkret dari transformasi ini adalah pengembangan Sistem Informasi Manajemen Data Kesejahteraan Sosial (SI-SINTAL) oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin, yang berfungsi sebagai sarana digital dalam pengelolaan data dan layanan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Kota Banjarmasin, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, menghadapi tantangan sosial yang kompleks dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mencapai 31.062 jiwa pada tahun 2023.

No	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah		Total (orang)
		L	P	
1	Anak Balita Terlantar	2	0	2
2	Anak Terlantar	43	46	89
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	0	1	1
4	Anak Jalanan	0	0	0
5	Anak dengan Kedisabilitas	21	15	36
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan	1	1	2
7	Lanjut Usia Terlantar	1,053	181	286
8	Penyandang Disabilitas	515	430	945
9	Tuna Susila	7	61	68
10	Gelandangan	42	50	92
11	Pengemis	16	27	43
12	Pemulung	68	36	104
13	Kelompok Minoritas	21	81	102
14	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan	725	104	829
15	Orang dengan HIV/AIDS	20	11	31
16	Korban Penyalahgunaan NAPZA	74	0	74
17	Korban Trafficking	0	1	1
18	Korban Tindak Kekerasan	0	1	1
19	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	5	3	8
20	Korban Bencana Alam	29	26	55
21	Korban Bencana Sosial	88	74	162
22	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0	1,926	1,926
23	Fakir Miskin	4,273	22,196	26,469
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	1	1	2
25	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0
	-	7,004	25,272	31,328

Sumber : Satu Data Kota Banjarmasin PMKS 2023

Jumlah yang ini menunjukkan bahwa permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Banjarmasin masih menjadi tantangan besar yang memerlukan penanganan efektif dan efisien. Kondisi ini menuntut respons kebijakan yang inovatif dan berbasis data. Penggunaan teknologi informasi diharapkan dapat memperbaiki kinerja layanan sosial secara menyeluruh, mulai dari proses pendataan, validasi, penyaluran bantuan, hingga pengawasan publik. Dalam konteks tersebut, SI-SINTAL dikembangkan untuk menjawab kebutuhan akan sistem informasi yang terintegrasi dan responsif.

Secara normatif, pelaksanaan layanan kesejahteraan sosial berbasis digital telah mendapatkan legitimasi melalui berbagai regulasi nasional dan daerah, di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Di tingkat lokal, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah SPBE turut memperkuat penerapan SI-SINTAL sebagai instrumen utama dalam transformasi pelayanan publik di bidang kesejahteraan sosial.

Implementasi teknologi digital dalam birokrasi pelayanan sosial tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik teknis maupun struktural. Kendala jaringan internet, kesiapan sumber daya manusia, serta literasi digital masyarakat menjadi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan sistem ini. Jadi, evaluasi terhadap pemanfaatan SI-SINTAL penting dilakukan

sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penajaman arah kebijakan sosial.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji implementasi SI-SINTAL dalam pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Banjarmasin, menyoroti manfaat, tantangan, serta potensi pengembangannya sebagai model layanan sosial berbasis elektronik yang adaptif dan inklusif di era digital..

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggambarkan secara mendalam dan rinci proses implementasi aplikasi SI-SINTAL dalam pelayanan kesejahteraan sosial serta kendala yang dihadapi selama magang. Penelitian ini tidak menggunakan instrumen kuantitatif atau pengujian hipotesis statistik, melainkan mengandalkan data empiris yang diperoleh secara langsung dari keterlibatan aktif di lapangan.

### **Waktu Dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilaksanakan selama kegiatan Magang III, yang berlangsung mulai tanggal 9 April hingga 8 Mei 2025, bertempat di Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Fokus utama penelitian adalah aktivitas di Bidang Pengembangan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, yang mengelola aplikasi SI-SINTAL sebagai sistem layanan sosial berbasis digital.

### **Sasaran Dan Subjek Penelitian**

Sasaran dari penelitian ini adalah sistem informasi manajemen pelayanan kesejahteraan sosial yang dikenal sebagai SI-SINTAL. Peneliti tidak hanya mengamati sistem secara teknis, tetapi juga menelusuri bagaimana sistem ini dijalankan dalam praktik pemerintahan daerah. Subjek penelitian terdiri dari:

- Operator SI-SINTAL tingkat kelurahan, yang melakukan input dan validasi data penerima bantuan sosial.
- Staf bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, yang mengelola sistem di tingkat dinas.
- Masyarakat pemohon bantuan sosial, yang mengakses layanan secara daring melalui SI-SINTAL.
- Peneliti sendiri, yang berperan sebagai partisipan aktif selama magang, mengalami langsung dinamika penggunaan sistem.

### **Prosedur Penelitian**

Prosedur penelitian dibagi ke dalam empat tahap, sesuai dengan alur kegiatan magang:

1. Tahap orientasi kelembagaan (minggu pertama)  
Peneliti mengikuti pengenalan struktur organisasi, fungsi setiap bidang, serta peraturan teknis terkait pelayanan sosial. Peneliti juga mulai mengakses dan mempelajari SOP pelayanan dan dasar regulasi SI-SINTAL.
2. Tahap observasi dan partisipasi teknis (minggu kedua dan ketiga)  
Peneliti secara langsung membantu proses penginputan dan validasi data DTKS ke dalam SI-SINTAL. Aktivitas ini meliputi verifikasi manual, klasifikasi PMKS dan PSKS, serta pembaruan data rumah tangga miskin berdasarkan skor kesejahteraan.
3. Tahap pengumpulan dan pengolahan data (minggu ketiga dan keempat)

Peneliti mulai melakukan rekapitulasi data bantuan sosial, pengarsipan hasil input, dan mencermati fitur-fitur sistem seperti status tindak lanjut permohonan, menu sanggah bantuan, dan distribusi bantuan berdasarkan kategori.

#### 4. Tahap dokumentasi, refleksi, dan penyusunan temuan (akhir minggu keempat)

Peneliti mengkaji seluruh temuan lapangan, termasuk hambatan seperti gangguan koneksi, kendala operator, serta ketidaksesuaian data. Peneliti menyusun narasi evaluatif sebagai dasar interpretasi ilmiah.

### Instrumen Penelitian

Peneliti menggunakan kombinasi instrumen yang bersifat dokumentatif dan observasional, antara lain:

- Jurnal harian magang, sebagai catatan sistematis kegiatan dan temuan setiap hari, mulai dari pengenalan sistem hingga refleksi akhir.
- Dokumen rekap data bantuan, yang digunakan untuk meninjau keakuratan dan volume layanan dalam SI-SINTAL.
- Tangkapan layar fitur aplikasi, seperti tampilan input data, hasil pencarian NIK, status pengajuan, dan menu validasi rumah tangga.
- Dokumen SOP internal dan Peraturan Walikota, sebagai sumber pembanding terhadap pelaksanaan teknis di lapangan.
- Interaksi informal dengan operator, yang memberikan informasi tak tertulis mengenai kendala dan improvisasi sistem selama penggunaan.

### Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan pendekatan tematik. Setiap catatan lapangan dikategorikan ke dalam beberapa tema utama, yaitu:

- Efektivitas sistem dalam mempercepat layanan
- Transparansi dan akuntabilitas data
- Kendala teknis dan SDM
- Respon masyarakat terhadap digitalisasi

Setelah pengelompokan data berdasarkan tema, peneliti menyusun narasi evaluatif yang menjelaskan keterkaitan antara pengalaman empiris dengan tujuan penelitian. Validasi temuan dilakukan melalui pembandingan antara observasi, hasil input sistem, dan dokumen resmi Dinas Sosial.

### Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan metode. Hasil observasi dikonfirmasi dengan data tertulis dari sistem dan diklarifikasi melalui diskusi informal dengan operator. Selain itu, kehadiran peneliti secara konsisten selama 31 hari kerja magang memberikan kedalaman pengalaman dan mengurangi bias interpretatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemanfaatan SI-SINTAL sebagai Mesin Layanan Digital

SI-SINTAL (Sistem Informasi Manajemen Data Kesejahteraan Sosial) merupakan bentuk konkret digitalisasi pelayanan sosial oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Sistem ini dikembangkan untuk menggantikan prosedur manual yang lamban, tidak terdokumentasi dengan baik, dan rentan penyimpangan. Melalui SI-SINTAL, proses pengajuan bantuan sosial, verifikasi, validasi, hingga distribusi dilaksanakan dalam satu platform daring yang terintegrasi.

Masyarakat dapat mengakses sistem secara mandiri menggunakan NIK untuk mengecek status pengajuan bantuan sosial. Operator kelurahan bertugas melakukan input awal, dan tim

verifikasi dari dinas melakukan pemeriksaan lapangan berbasis indikator sosial ekonomi. Prosedur ini menyederhanakan birokrasi yang sebelumnya membutuhkan waktu sehari-hari, menjadi hanya dalam hitungan jam. Transparansi meningkat signifikan karena setiap tahapan terekam secara real-time dan dapat diawasi secara publik.

Dashboard SI-SINTAL menyajikan klasifikasi program bantuan seperti PKH, BPNT, PBI, dan RASKO, lengkap dengan riwayat distribusi dan status pengajuan. Fitur unggulan lainnya adalah *sanggah bansos*, yang memberi ruang bagi masyarakat untuk melaporkan ketidaktepatan penerima bantuan. Pelaporan dapat dilakukan tanpa menyebutkan identitas pelapor, memberikan rasa aman dan meningkatkan partisipasi warga dalam kontrol sosial.

Sistem ini juga digunakan dalam pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), termasuk klasifikasi rumah tangga berdasarkan skor kesejahteraan (skor ruta) yang dihitung secara sistematis. Kriteria seperti pekerjaan, jumlah tanggungan, dan kondisi tempat tinggal digunakan untuk menentukan kelayakan menerima bantuan. Pendekatan ini menyingkirkan penilaian subjektif dan memperkuat akuntabilitas kebijakan.

### Respons Organisasi terhadap Sistem Digital

Efisiensi operasional meningkat drastis sejak SI-SINTAL diimplementasikan. Data internal menunjukkan bahwa sebanyak 30.186 layanan diproses melalui sistem ini. Setiap pengajuan, pemutakhiran, dan validasi dilakukan secara daring, memungkinkan percepatan pengambilan keputusan. Petugas tidak lagi bergantung pada pengiriman dokumen fisik, karena semua data terekam dalam sistem dan dapat diakses kapan saja.

Fitur ekspor data ke format Excel memudahkan penyusunan laporan. Kepala bidang atau kepala dinas dapat memantau kinerja bantuan sosial melalui satu tampilan terpadu. Seluruh aktivitas operator, jumlah bantuan yang disalurkan, serta sebaran geografis penerima dapat dipantau secara real-time. Keputusan tidak lagi bergantung pada laporan manual, melainkan pada data yang dihimpun dan dianalisis langsung oleh sistem.

Koordinasi lintas bidang juga terbantu melalui pemisahan akun pengguna sesuai kewenangan. Misalnya, bidang rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial masing-masing memiliki akses terhadap data yang relevan. Hal ini mengurangi duplikasi kerja dan mempercepat proses antar unit, menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan adaptif.

### Tantangan Teknis dan Sumber Daya Manusia

Implementasi SI-SINTAL menghadapi tantangan serius pada aspek infrastruktur dan sumber daya manusia. Jaringan internet di sejumlah kelurahan masih tidak stabil. Kondisi ini memperlambat akses sistem, terutama saat proses verifikasi atau validasi data secara daring. Keterbatasan ini menciptakan tumpukan pekerjaan, terutama pada jam-jam sibuk saat banyak pengajuan masuk secara bersamaan.

Sumber daya manusia, khususnya operator kelurahan, belum memiliki kompetensi teknis yang merata. Banyak operator hanya menguasai fitur dasar, seperti input data dan pencarian status. Fitur strategis seperti perangkingan rumah tangga, ekspor data, dan pemantauan tindak lanjut sering diabaikan. Hal ini menyebabkan sistem tidak digunakan secara optimal dan potensi efisiensi tidak tercapai sepenuhnya.

Literasi digital masyarakat juga menjadi hambatan signifikan. Banyak warga yang tidak mampu mengakses atau memahami prosedur daring. Kesalahan pengisian data, kekeliruan dalam mengunggah dokumen, serta miskomunikasi mengenai status pengajuan sering terjadi. Ketidaktepatan input menyebabkan verifikasi menjadi lebih lama dan memperbesar risiko penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.

Gangguan server juga menjadi masalah berulang. Sistem sering tidak dapat diakses saat trafik tinggi, seperti menjelang penutupan pendataan atau masa pencairan bantuan.

Keterbatasan kapasitas server memperlambat kinerja sistem secara keseluruhan. Belum adanya integrasi langsung dengan database kependudukan nasional (Dukcapil) menyebabkan proses validasi identitas masih harus dilakukan manual, menambah beban kerja operator.

### Evaluasi Sistem dan Relevansi Kebijakan

Dari sisi regulasi, SI-SINTAL didukung oleh sejumlah kebijakan nasional dan lokal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjamin hak masyarakat atas layanan publik yang berkualitas. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mendorong transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Di tingkat daerah, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi SPBE memperkuat legitimasi sistem ini sebagai layanan resmi.

SI-SINTAL bukan sekadar aplikasi, melainkan instrumen pemerintahan yang mengubah tata kelola bantuan sosial dari berbasis kertas menjadi berbasis data. Sistem ini mendefinisikan ulang relasi antara warga dan negara dalam distribusi bantuan. Namun, ada kesenjangan nyata antara desain sistem dan implementasi teknis. Fitur yang canggih tidak akan efektif jika pengguna tidak mampu mengoperasikan sistem secara utuh.

Digitalisasi pelayanan sosial tidak bisa hanya berhenti pada penyediaan sistem. Perlu transformasi budaya organisasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Pelatihan teknis tidak boleh hanya bersifat seremonial. Operator harus dibekali pemahaman strategis mengenai seluruh alur sistem, bukan sekadar pelaksanaan teknis permukaan.

Selain itu, Pemerintah Kota Banjarmasin harus menyiapkan ekosistem pendukung, seperti perluasan infrastruktur internet di kelurahan, peningkatan kapasitas server, serta integrasi lintas basis data. Edukasi masyarakat juga penting agar kesenjangan digital tidak menjadi penghambat akses terhadap bantuan sosial yang menjadi hak warga negara.

SI-SINTAL menunjukkan bahwa pemerintahan daerah mampu merancang sistem pelayanan publik yang modern dan adaptif. Namun keberhasilan sistem digital tidak hanya ditentukan oleh kehadirannya, melainkan oleh kemauan politik, kapasitas SDM, dan konsistensi evaluasi.

### KESIMPULAN

Digitalisasi pelayanan kesejahteraan sosial melalui aplikasi SI-SINTAL membuktikan bahwa inisiatif lokal mampu menjawab kompleksitas distribusi bantuan sosial secara lebih efisien, transparan, dan terukur. Sistem ini mempercepat alur pengajuan hingga penyaluran bantuan, memotong birokrasi manual, dan memperkuat kontrol publik terhadap akurasi data penerima manfaat. Dengan fitur seperti pelacakan NIK, perangkingan rumah tangga, dan sanggah bansos, SI-SINTAL menandai pergeseran dari pola pelayanan birokratis ke arah layanan yang partisipatif dan berbasis data.

Namun demikian, keberhasilan sistem masih tertahan oleh kendala struktural dan teknis. Ketimpangan kapasitas operator, minimnya literasi digital masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur jaringan dan server menjadi hambatan utama dalam optimalisasi sistem. Sistem yang canggih tidak akan efektif jika dijalankan dalam ekosistem yang tidak mendukung.

Rekomendasi strategis untuk penguatan ke depan mencakup: (1) peningkatan kapasitas teknis operator melalui pelatihan berkala yang aplikatif dan terstandar; (2) integrasi langsung dengan database kependudukan nasional untuk mempercepat validasi; (3) penguatan infrastruktur digital hingga ke tingkat kelurahan; dan (4) edukasi masyarakat agar mampu memanfaatkan layanan daring secara mandiri dan akurat.

SI-SINTAL dapat menjadi model replikasi nasional jika keberadaannya tidak hanya diposisikan sebagai produk teknologi, tetapi juga sebagai alat reformasi layanan sosial yang berkeadilan dan akuntabel.



## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Dinas Sosial Kota Banjarmasin. (2023). *Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2023*. Banjarmasin: Dinsos Kota Banjarmasin.

Dinas Sosial Kota Banjarmasin. (2024). *Rencana kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Banjarmasin tahun 2024*. Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. (2023). *Data Statistik Kependudukan*. Diakses dari <https://satudata.banjarmasinkota.go.id/data-statistik/73142215-077e-4ecb-b286-766fc2d27423>

Kompas.com. (2022, Maret 30). *Profil Kota Banjarmasin*. <https://regional.kompas.com/read/2022/03/30/172327478/profil-kota-banjarmasin?page=all>

Setyaningrum, P. (2022, 30 Maret). *Profil Kota Banjarmasin*. Kompas.com. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/03/30/172327478/profil-kota-banjarmasin?page=all> KOMPAS.com

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. (2022). *Profil Kota Banjarmasin*. Diakses dari <https://kalsel.bpk.go.id/kota-banjarmasin/BPKKalsel+2>

Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. (2023). *Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin*. Banjarmasin: Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

Pemerintah Kota Banjarmasin. (2023). *Laporan Perekonomian Kota Banjarmasin 2023*. Banjarmasin: Pemerintah Kota Banjarmasin.